

BAB V

KESIMPULAN

Patriarki dan domestikasi bermanifestasi menjadi standar yang harus dimiliki perempuan Indonesia untuk menjadi perempuan yang layak dan pantas di mata masyarakat. Standar itu mengharuskan perempuan menjadi pihak yang submisif di bawah kepemimpinan suami mereka. Kewajiban menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga dijadikan alasan untuk mengekang perempuan dalam menuntut ilmu, menyuarkan pendapat di masyarakat ataupun tentang hak perempuan di dalam dunia perpolitikan.

Politik Etis yang berhasil dinikmati segelintir perempuan membawa mereka menuju kesadaran bahwa mereka hidup di bawah keterbelengguan standar masyarakat dan menihilkan hak-hak mereka sebagai manusia dan juga rakyat dari suatu negara. Perempuan-perempuan yang tercerahkan itu berhasil bertemu dengan teman seperjuangan dan tidak membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk membuat organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak-hak mereka. Sebagian besar organisasi ini masih memperjuangkan tentang fenomena-fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari mereka, isu yang membumi bagi hidup mereka. Organisasi ini ada yang didirikan oleh perempuan untuk memperjuangkan isu perempuan dan ada pula perkumpulan yang tumbuh dari sayap organisasi utama.

Biasanya dalam organisasi perempuan ini muncul nama yang mencolok, seperti Maria Ulfah Santoso yang vokal menyampaikan aspirasinya di berbagai

pertemuan tentang betapa pentingnya bagi perempuan untuk memiliki hak pilih pasif maupun aktif agar bisa memilih anggota *Volksraad* dan mengisi kursi itu dengan perempuan. Maria Ulfah juga tidak ragu menyampaikan aspirasinya melalui surat kabar untuk melawan pihak oposisi yang menganggap dirinya dan orang-orang yang berjuang dengannya untuk mendapatkan hak pilih perempuan merupakan golongan yang radikal. Usaha Maria Ulfah beserta berbagai pihak tidak sia-sia, akhirnya perempuan diizinkan untuk memilih dan dipilih dalam *Volksraad*, meski kesempatan itu belum bisa tercapai karena penyerangan Jepang ke Hindia Belanda. Selepas kemerdekaan Indonesia, pemilu belum bisa dilaksanakan karena diharuskan untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi negara lain. Setelah itu membutuhkan katalis peristiwa yang menekan pemerintah mengenai urgensi pemilu bagi rakyat. Pemilu pertama Indonesia akhirnya berhasil dilaksanakan setelah 10 tahun merdeka, yaitu di tahun 1955.

Berbagai parpol segera merangkai taktik untuk mendapatkan suara dari rakyat. Taktik yang paling sering digunakan adalah dengan mendirikan sayap organisasi perempuan untuk menarik simpati suara. Ada pula yang berusaha untuk menggandeng organisasi perempuan untuk berafiliasi dengan partai politik tertentu. *Fatwa* sampai dikeluarkan untuk melawan stereotipe yang ada di masyarakat tentang larangan perempuan untuk ikut andil dalam dunia perpolitikan.

Hasil pemilu 1955 total ada 13% kursi DPR yang diisi oleh perempuan, dengan jumlah 19 kursi dari jumlah 257 kursi yang ada. Sedangkan untuk Badan Konstituante, perempuan hanya mendapatkan 25 jatah kursi dari total 513 kursi.